

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Instansi Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Renja 2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

#### 1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Kecamatan Yosowilangun menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu

acuan bagi Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

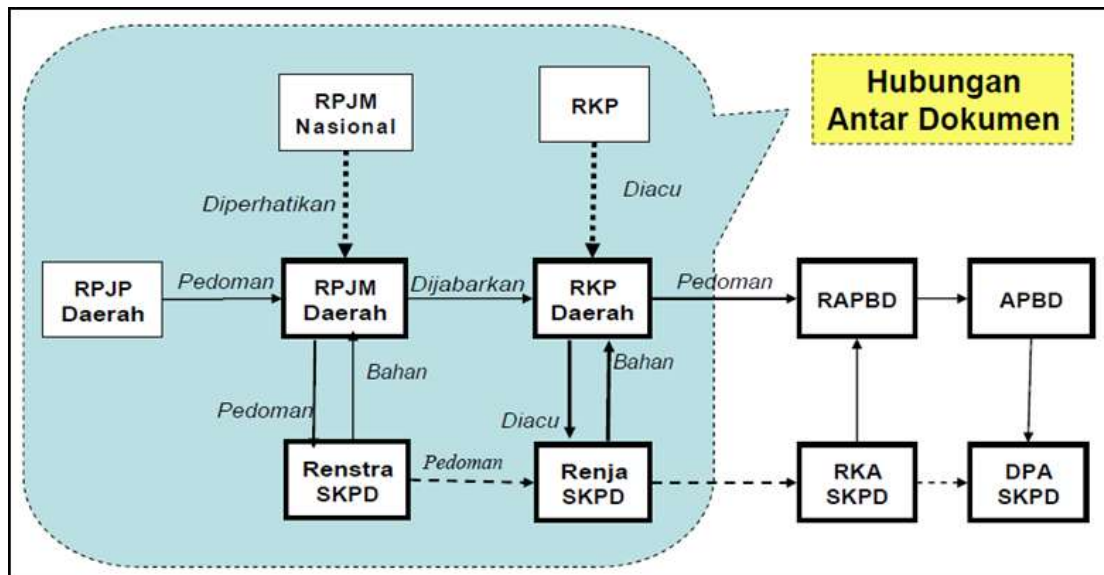
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

### **1.1.2. Proses Penyusunan Renja**

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

### **1.1.2. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan Jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
18. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum. Kecamatan Yosowilangun untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

#### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022**

Berisi tentang : Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022;

#### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan;

#### **BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;

## **BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang : uraian penutup.

## **Lampiran**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Yosowilangun**

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu(2021) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:  
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:
  1. Program pelayanan Administrasi perkantoran;
  2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
  3. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan, di Kecamatan Yosowilangun tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan.

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Yosowilangun tersaji dalam Tabel. T-C.29.

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan/dTahun (n-2)-2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan Tahun Lalu (n-2)-2020 (Renja PD)			Target Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan tahun (n-1)-2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)-2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)-2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/SubKegiatan/dtahun berjalan (tahun n-1)-2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
7 01 01	<b>PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN FASILITASI OPERASIONAL KANTOR</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%
7 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2Dokumen	2Dokumen	2Dokumen	2Dokumen	100%	2Dokumen	2Dokumen	0%



						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	100%	1Dokumen	1Dokumen	0%
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	100%	1Dokumen	1Dokumen	0%
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	100%	1Dokumen	1Dokumen	0%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	2Dokumen	2Dokumen	2Dokumen	2Dokumen	100%	2Dokumen	2Dokumen	0%
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3Dokumen	3Dokumen	3Dokumen	3Dokumen	100%	3Dokumen	3Dokumen	100%
	7	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	11ASN	12ASN	11ASN	11ASN	100%	11ASN	10ASN	100%
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	12Bulan	12 Bulan	12Bulan	12Bulan	100%	100%	12Bulan	100%

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	5laporan	5Laporan	5Laporan	5Laporan	100%	100%	5Laporan	100%
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Jenis Laporan Prognosis	1laporan	1Laporan	1Laporan	1Laporan	100%	1Laporan	1Laporan	100%
	7	01	01	2	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	100%	1Dokumen	1Dokumen	100%
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah fasilitasi pengamanan BMD	2jenis	-	-	-	-	2jenis	2Jenis	100%
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Penilaian BMD	2laporan	-	-	-	-	2jenis	2Jenis	100%
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD	2laporan	-	-	-	-	2laporan	2Laporan	100%
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi piñata usahaanBMD	4Dokumen	-	-	-	-	4Dokumen	4Dokumen	100%
	7	01	01	2	04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN terdata	17Pegawai	21Pegawai	17Pegawai	17Pegawai	100%	17Pegawai	17Pegawai	100%
							Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian	17Pegawai	21Pegawai	17Pegawai	17Pegawai	100%	17Pegawai	17Pegawai	100%
1						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	12laporan	12Laporan	12Laporan	12Laaporan	100%	12Laporan	12Laporan	100%
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah regulasi kepegawaian tersosialisasi	3regulasi	3regulasi	3regulasi	3regulasi	100%	3Regulasi	3Regulasi	100%
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	2ASN	2ASN	-	-	-	2ASN	2ASN	100%
	7	01	01	2	05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	15Jenis	17Jenis	17Jenis	17Jenis	100%	-	17Jenis	100%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/perengkapan kantor yang disediakan	2Jenis	6Jenis	-	-	-	-	-	-

						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	5Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistic kantor yang disediakan	43jenis	43Jenis	43Jenis	43Jenis	100%	43Jenis	43Jenis	100%				
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	4Jenis	4Jenis	4Jenis	4Jenis	100%	4Jenis	4Jenis	100%				
							Jumlah fasilitas penggandaan dokumen	2jenis	2Jenis	2Jenis	2Jenis	100%	2Jenis	2Jenis	100%				
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	1jenis	1Jenis	1Jenis	1Jenis	100%	0	0	0				
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas rakor SKPD	495Kali	495kali	495kali	495kali	100%	495kali	495kali	100%				
7	01	01	2	06		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang disediakan	2Jenis	100unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis alat dan mesin lain yang disediakan	3Jenis	1unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung/kantor/bangunan lain yang disediakan	1jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana gedung kantor/bangunan lain yang disediakan	3Jenis	-	10jenis	10jenis	100%	-	-	-
7	01	01	2	07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3Rekening	3Rekening	3Rekening	3Rekening	100%	3Rekening	3Rekening	100%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	12bulan	12bulan	12Bulan	12Bulan	100%	12Bulan	12Bulan	100%
7	01	01	2	08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	5kendaraan	5kendaraan	5kendaraan	5Kendaraan	100%	5Kendaraan	5Kendaraan	100%
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang dipelihara	15jenis	-	-	-	-	-	-	-
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	1Paket	1paket	-	-	-	-	-	-

						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan Mesin lain yang dipelihara	15jenis	29jenis	7Jenis	7Jenis	100%	15Jenis	19Jenis	1,97%
7	01	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	86%	99%	86%	99%	115%	86%	95%	110%
7	01	02	2	02		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan</b>	86%	100%	86%	100%	116%	86%	100%	116%
7	01	02	2	02	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi lintas sector	4laporan	4laporan	4Laporan	4Laporan	100%	-	-	-
7	01	02	2	03		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase fasilitas pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	86%	-	-	-	-	-	-	-
7	01	02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah laporan koordinasi terkait pemeliharaan sarpras umum	4laporan	-	-	-	-	-	-	-
7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<b>Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan</b>	86%	98%	86%	98%	114%	86%	90%	105%

7	01	02	2	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi	5.680Dokumen	5.550Dokumen	5.680Dokumen	5.570Dokumen	98%	5.680Dokumen	5.646 Dokumen	99%
7	01	05				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentas pemenuhan urusan pemerintahan umum</b>	86%	100%	86%	100%	116%	86%	95%	110%
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<b>Persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum</b>	86%	100%	86%	100%	116%	86%	95,33%	111%
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Jumlah fasilitasi tugas forkopimcam	12Fasilitasi	12Fasilitasi	12Fasilitasi	12Fasilitasi	100%	12Fasilitasi	12fasilitasi	100%
7	01	06				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu</b>	86%	100%	86%	100%	116%	86%	95.33%	111%

7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa</b>	86%	100%	86%	100%	100%	86%	95,33%	111%
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	12Desa	12Desa	12Desa	12Desa	100%	3Desa	3desa	100%
7	01	04				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keu Angantepat waktu</b>	86%	100%	86%	100%	100%	-	66.67%	-



7	01	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu</b>	86%	100%	86%	100%	100%	86%	95,33%	111%
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<b>Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	86%	100%	86%	100%	100%	86%	95,33%	111%
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelompok masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan; Jumlah Masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan	20pokmas	20pokmas	20pokmas	20Pokmas	100%	70 orang	70orang	100%
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	12desa	12Desa	12Desa	12Desa	100%	12Desa	12Desa	100%



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Yosowilangun dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

**Tabel T-C.30**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang**

INDIKATOR	TARGET				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
IKM Kecamatan	75	75	75	80	80	86,80	86,85	86,90	
ntasehasilfasilitasi dan koordinasi yang akanlanjuti	100%	100%	100%	100%	86%	50%	86%	86%	
ntasedesa yang usundokumenadministrasipemerintahandesa tepatwaktu	100%	100%	100%	100%	71%	67%	75%	75%	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada table berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 2.1

**Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang**

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1	Nilai IKM Kecamatan	Kuantitatif	<i>Nilai IKM Kecamatan</i>	Penghitungan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Yosowilangun atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan survey secara berkala
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/Lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$	Data bersumber dari seluruh Seksi dan Subag terhadap kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi secara berkala
3	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen administrasi tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kecamatan}} \times 100 \%$	Data bersumber dari Seksi Pemerintahan terhadap laporan desa yang telah diselesaikan.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa secara berkala

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Yosowilangun berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Kecamatan Yosowilangun dapat diidentifikasi.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan

analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Yosowilangun didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	1. Sarana dan prasarana pendukung administrasi belum memadai	1. Penyediaan fasilitas IT Kecamatan Yosowilangun masih terbatas 2. Sarana gedung yang ada masih belum memadai
		2. Keterbatasan aparatur/staf yang menangani tugas-tugas sehingga menyebabkan penyelesaian tugas kurang maksimal	1. Masih kurangnya Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian 2. Masih terbatasnya Jumlah personil yang menguasai pengoperasian IT pada setiap seksi dan bagian
		3. Belum optimalnya Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kecamatan	1. Kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing 2. Adanya Keterbatasan prasarana fasilitas IT dalam penyelesaian tugas dan fungsi aparatur
		4. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan	1. Lamanya waktu pengurusan Administrasi kependudukan 2. Belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan
		5. Belum optimalnya peran anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah desa	1. Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan Linmas yang berkelanjutan
			2. Belum efektifnya pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan
		6. Belum optimalnya kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	1. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat masih belum efektif 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pemberdayaan
7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan/ Musrenbang	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif 2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif masyarakat		

		dalam pembangunan
	8. Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan masih belum memadai</li> <li>2. Masih rendahnya tingkat koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan</li> <li>3. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa terkait akuntabilitas keuangan dan pelaporan masih belum efektif</li> </ol>

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2021 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu mengakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Yosowilangun. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

Tabel T-C.32

**USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN  
2022 KABUPATEN LUMAJANG**

**Kecamatan Yosowilangun**

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah e. Administrasi Umum Perangkat Daerah f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Yosowilangun		
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Yosowilangun		
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Yosowilangun		
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Yosowilangun		
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Yosowilangun		

### **BAB III.**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Visi**

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);.
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG  
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

#### **1. Misi**

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :



N O	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, permukiman, perlindungan masyarakat dan social)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih ( <i>good and clean governance</i> );	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023 adalah :

**Tujuan Misi 1 adalah :**

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**Tujuan Misi 2 adalah :**

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

**Tujuan Misi 3 adalah :**

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Kecamatan Yosowilangun mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

## **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Yosowilangun untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatkan kepuasan masyarakat.

### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Yosowilangun selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Yosowilangun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Kepemerintahan yang baik ditetapkan 1 (satu) sasaran dan (3) tiga indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.
  - a. Nilai IKM Kecamatan;
  - b. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti;
  - c. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu;

### **3.2.3. Strategi dan kebijakan**

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun strategi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung;
- b. Mengoptimalkan peran aparatur kecamatan yang ada dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi pemerintahan;

- c. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas ASN berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
- d. Meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan;
- e. Mengoptimalkan peran anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah desa ;
- f. Mengoptimalkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
- g. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan/Musrenbang;
- h. Mengoptimalkan pelaksanaan pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa.

Dalam rangka mencapai strategi maka diperlukan kebijakan sebagai arah yang diambil perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Kebijakan Kecamatan Yosowilangun adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyediaan fasilitas IT Kecamatan Yosowilangun;
2. Melakukan penambahan gedung dan mengoptimalkan Sarana gedung yang tersedia;
3. Mengoptimalkan Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian
4. Meningkatkan kemampuan IT personil pada setiap seksi dan bagian dengan penyediaan fasilitas IT;
5. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing aparatur;
6. Mengoptimalkan prasarana fasilitas IT yang ada dalam penyelesaian tugas dan fungsi;
7. Mempersingkat alur pengurusan Administrasi kependudukan ;
8. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan;
9. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan Linmas yang berkelanjutan;
10. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan;
11. Mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat;
12. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pemberdayaan;
13. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif ;
14. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran aktif masyarakat dalam pembangunan ;
15. Meningkatkan Kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan ;
16. Mengoptimalkan koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan;
17. Mengoptimalkan Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa terkait akuntabilitas keuangan dan pelaporan.

Arah kebijakan tersebut dikuatkan dengan beberapa Program sebagai rencana tindak lanjut jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

#### **3.2.4. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan**

Seiring dengan misi yang ditetapkan Kecamatan Yosowilangun, factor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian visi, misi dan nilai-nilai organisasi yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai sistem kerja yang ada;
- c. Tersedianya aparatur yang profesional dan berkualitas;
- d. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban yang memadai;
- e. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;
- f. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
- g. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>FORMULA</b>	<b>Target Kinerja 2021</b>
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Nilai IKM	<i>Nilai IKM Kecamatan</i>	86,95 %
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti			<i>Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti</i> $\frac{\text{Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/Lembaga lain yang terkait}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kecamatan}} \times 100 \%$	86 %	
Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu			<i>Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen administrasi tepat waktu</i> $\frac{\text{Jumlah seluruh desa di Kecamatan}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kecamatan}} \times 100 \%$	83 %	

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Yosowilangun diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah asilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintah.
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa
  - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1. Program Utama**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Yosowilangun Tahun 2021 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

**Program dan Kegiatan Kecamatan Yosowilangun  
Tahun 2022**

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</li> <li>2. Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>3. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>4. Penyediaan logistic kantor</li> <li>5. Penyediaan barang cetakan</li> <li>6. Penyediaan bahan material</li> <li>7. Penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD</li> <li>8. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air</li> <li>9. Penyediaan pelayanan umum kantor</li> <li>10. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</li> </ol>
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah</li> </ol>
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja**

Sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan dari Rencana Kerja ini adalah dalam jangka waktu satu tahun. Adapun perinciannya sebagai berikut :

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	<p><b>Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah jenis dokumen perencanaan</li> <li>3. Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun</li> <li>4. Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>5. Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD</li> <li>6. Jumlah dokumen LAKIP</li> <li>7. Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan</li> <li>8. Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2 dokumen</li> <li>1 dokumen</li> <li>1 dokumen</li> <li>1 dokumen</li> <li>1 dokumen</li> <li>1 dokumen</li> <li>12 ASN</li> <li>12 bulan</li> </ol>

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			9. Jumlah Dokumen Akuntansi 10. Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 11. Jumlah Jenis Laporan Keuangan 12. Jumlah Laporan BMD 13. Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai 14. Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan 15. Jumlah jenis bahan logistic kantor yang disediakan 16. Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan/jumlah fasilitasi penggandaan dokumen 17. Jumlah jenis bahan/material disediakan 18. Jumlah fasilitasi kunjungan tamu 19. Jumlah fasilitasi rakor SKPD 20. Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan 21. Jumlah rekening yang dibayar 22. Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor 23. Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara 24. Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara 25. Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara/direhabilitasi  <u>Outcomes</u> Nilai IKM Kecamatan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 7 komponen 65 jenis 7 jenis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 jenis 5 rekening 12 bulan 12 kendaraan 3 jenis 2 jenis  88
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan	<u>Output:</u> 1. Jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi  <u>Outcomes</u> Nilai IKM Kecamatan	6 dokumen   88
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	<u>Output:</u> 1. Jumlah desa yang terfasilitasi Musrenbang 2. Jumlah masyarakat yang terbina Pemberdayaan  <u>Outcomes:</u> Nilai IKM Kecamatan	12 desa 12 desa  88
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	<u>Output:</u> 1. Jumlah Fasilitasi tugas Forkopimca  <u>Outcomes</u> Nilai IKM Kecamatan	12 bulan  88
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa	Persentase desa tertib Administrasi	<u>Output:</u> 1. Jumlah Desa yang terbina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa  <u>Outcomes</u> Nilai IKM Kecamatan	12 desa 3 desa  86,95



### **4.3. Alokasi Anggaran**

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Yosowilangun Tahun Anggaran 2022 direncanakan adalah sebesar **Rp.2.141.876.496,-**dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp.1.468.276.468,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp.673,600,028,-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023. Rencana Kerja Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2022.

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Kami berharap dukungan dari seluruh pelaku pembangunan dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua kalangan, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Yosowilangun dan masyarakat Kabupaten Lumajang pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk segenap pihak khususnya bagi aparat Kecamatan Yosowilangun.

Lumajang, Oktober 2021  
CAMAT YOSOWILANGUN



**INDRIONO KRISHNA MURTI, AP**  
NIP. 19730702 199311 1 001

## PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang ini.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Yosowilangun yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja 2022 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2022 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Kecamatan Yosowilangun ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Lumajang, Oktober 2021  
CAMAT YOSOWILANGUN



**INDRIONO KRISHNA MURTI, AP**  
NP. 19730702 199311 1 001

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021</b> .....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022	
2.2. Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Yosowilangun .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	11
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	15
3.3. Program dan Kegiatan .....	19
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> ...	20
4.1. Program Utama.....	20
4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja .....	20
4.3. Alokasi Anggaran.....	22
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	23

**RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATANYOSOWILANGUN  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN YOSOWILANGUN**